



PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk :

20200210

No. Panggil :

AIP 23

Krisis Politik dan Resesi Ekonomi Hong Kong (2019) dalam Perspektif Konstelasi Global dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia

Muhammad Farid S.S., M.P.A

Dosen Program Studi Hubungan Internasional President University, Jawa Barat; mfarid@
president.ac.id, muhammadfarid.bahar@gmail.com

Abstrak

Hong Kong, daerah administrasi khusus Tiongkok, dilanda krisis politik yang ditandai serial unjuk rasa besar-besaran sejak munculnya wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi pada Februari 2019. Jika disahkan, undang-undang itu memungkinkan ekstradisi dari Hong Kong ke berbagai negara tanpa perjanjian ekstradisi bilateral dengan wilayah itu, seperti ke Tiongkok. Bagi sebagian warga Hong Kong, hal tersebut dapat mengancam demokrasi dan kebebasan yang mereka nikmati dalam kerangka prinsip “satu negara dua sistem” sejak Hong Kong kembali ke Tiongkok pada 1 Juli 1997. Krisis politik itu kemudian membawa Hong Kong lebih jauh kepada resesi ekonomi di tengah memanasnya Perang Dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang sudah berlangsung sejak tahun 2018. Krisis politik dan resesi ekonomi Hong Kong diprediksi akan berkontribusi pada krisis global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020. Tidak hanya itu, apa yang tengah terjadi di Hong Kong berpotensi membawa imbas pada dimensi tertentu bagi Indonesia. Artikel ini membahas kedudukan krisis politik dan resesi ekonomi pada konstelasi global, terutama dalam kontestasi AS-Tiongkok, serta potensi dampaknya bagi Indonesia, terutama dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Kata kunci: Krisis politik, resesi ekonomi, konstelasi global





Sumber ilustrasi: kompas.com

PENDAHULUAN

Hong Kong mengalami krisis politik yang dipicu oleh pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Ekstradisi pada Februari 2019. Jika disahkan, Undang Undang Ekstradisi ini memungkinkan seorang tahanan di Hong Kong diekstradisi ke berbagai wilayah yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi bilateral dengan Hong Kong, termasuk ke Tiongkok.

Langkah itu menuai keresahan sebagian warga Hong Kong karena dianggap dapat mengancam kebebasan dan demokrasi di wilayah itu. Lebih dari itu, diberlakukannya Undang Undang Ekstradisi dikhawatirkan akan semakin memperkuat kontrol Tiongkok terhadap Hong Kong - wilayah yang sebelum 1 Juli 1997 berstatus sebagai salah satu *British Overseas Territories*.

Akibat isu RUU Ekstradisi, sejak Maret 2019 Hong Kong diwarnai oleh demonstrasi massal yang diklaim mencapai sekitar 1 juta demonstran pada bulan Juni 2019. Rentetan

demonstrasi itu tidak jarang berujung pada bentrokan fisik antara aparat keamanan dengan para demonstran, hingga pada aksi vandalisme terhadap gedung-gedung dan fasilitas umum seperti stasiun kereta bawah tanah. Bahkan, pada 14 Agustus 2019, seluruh penerbangan dari dan menuju Hong Kong dibatalkan menyusul pengepungan bandara oleh para demonstran (“Hong Kong protests: Key Dates as Peaceful Rallies Against Extradition Bill turn to Violent Clashes”, 4 September 2019).

Kepala Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Zhang Xiaoming bahkan menyebut bahwa situasi politik di Hong Kong saat ini merupakan yang paling buruk sejak penyerahan kembali wilayah itu kepada Tiongkok pada 22 tahun lalu (Ramzy dan May, 7 Agustus 2019).

RUU Ekstradisi akhirnya dicabut oleh Parlemen Hong Kong pada 23 Oktober 2019, setelah sebelumnya pada 4 September 2019 Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam



mencabut RUU itu.

Akan tetapi, para demonstran menganggap bahwa langkah itu sudah terlambat. Pencabutan RUU Ekstradisi sendiri hanya merupakan satu dari lima tuntutan, antara lain menolak pemberian istilah 'kerusuhan' bagi demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini; pemberian amnesti bagi demonstran yang ditangkap; diadakannya penyelidikan independen terhadap dugaan tindakan brutal polisi dalam menangani demonstrasi; serta diterapkannya hak pilih secara lengkap dan menyeluruh ("Hong Kong Formally Scraps Extradition Bill that Sparked Protests", 23 Oktober 2019).

Hingga artikel ini ditulis pada November 2019, krisis politik di Hong Kong belum menunjukkan tanda-tanda akan mengarah pada suatu penyelesaian positif. Terlebih lagi, demonstrasi yang semula berangkat dari masalah RUU Ekstradisi sudah berkembang menjadi seruan demokrasi dan adanya akuntabilitas. Bahkan, pada tanggal 11 November 2019, dua orang demonstran ditembak oleh polisi sehingga semakin memicu sentimen publik, sedangkan 260 orang lainnya ditahan oleh pihak berwajib (Kuo, 11 November 2019).

Pihak Tiongkok memandang bahwa demonstrasi yang terjadi di Hong Kong bukan merupakan aspirasi murni warga Hong Kong, melainkan terdapat dugaan campur tangan asing - seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Dalam pernyataannya saat kunjungan ke Nepal pada 13 Oktober 2019, Presiden Tiongkok sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (Sekjen PKT) Xi Jinping bersumpah akan menegakkan prinsip "satu

negara dua sistem" dan menegaskan bahwa pihak yang ingin memecahbelah Tiongkok akan hancur (Yau, Wu, dan Cheung, 13 October 2019).

Dalam beberapa demonstrasi di Hong Kong memang terdapat sejumlah peristiwa yang dapat mendorong spekulasi akan adanya keterlibatan asing. Hal itu terlihat dari aksi demonstran yang mengibarkan bendera AS dan meminta dukungan dari negara itu, serta tindakan demonstran lokal yang menyanyikan lagu kebangsaan Inggris pada saat berlangsungnya unjuk rasa.

Spekulasi ini menguat dengan pernyataan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson pada pertemuan kelompok G7 di Biarritz Perancis (26 Agustus 2019) yang mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin negara G7 yang beranggotakan AS, Inggris, Perancis, Kanada, Jerman, Italia, dan Jepang memiliki keprihatinan mendalam terhadap apa yang terjadi di Hong Kong ("PM statement at G7: 26 August 2019", 26 Agustus 2019). Bahkan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Dunia berharap agar Tiongkok akan menghormati dan melindungi kebebasan, serta cara hidup dan sistem hukum yang demokratis di Hong Kong ("Di Sidang PBB, Trump Tekan China soal Hong Kong", 25 September 2019).

Krisis politik, serta diperburuk oleh dampak Perang Dagang AS-Tiongkok telah berpengaruh negatif bagi perekonomian Hong Kong. Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Hong Kong tercatat mengalami kontraksi 0,5% dan 3,2% berturut-turut dalam dua kuartal, yaitu kuartal dua (Q2) dan kuartal tiga (Q3) tahun 2019.



Penurunan PDB selama dua kuartal berturut-turut merupakan kategori teknis terjadinya resesi, sehingga pemerintah Hong Kong pada 31 Oktober 2019 menyatakan bahwa wilayah itu telah memasuki resesi ekonomi (Voytko, 25 November 2019).

Pada tataran tertentu, kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh apa dampak resesi Hong Kong terhadap kemungkinan krisis global pada 2020. Dalam hal ini, beberapa pihak sudah menyampaikan sinyal tentang kemungkinan terjadinya krisis global pada 2020, termasuk Konferensi mengenai Perdagangan dan Pembangunan PBB (*UNCTAD* atau *United Nations Conference on Trade and Development*) (*Trade and Development Report 2019*, 2019, hal. II).

Bagi Indonesia, dinamika politik dan resesi ekonomi di Hong Kong, serta potensi dampaknya pada krisis global pada 2020 harus diantisipasi dengan baik agar tidak mengganggu ketahanan nasional. Perlu dicermati bahwa dalam era di mana teknologi informasi berkembang sangat pesat, diseminasi informasi dan koneksi antar individu dan golongan dapat berkembang cepat tanpa mendapat halangan berarti dari aspek geografis, teknologi, dan waktu. Pada konteks ini, tercatat bahwa aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia yang menolak Revisi UU KPK (Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Revisi UU KUHP (Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana) pada akhir September 2019 lalu turut mendapat dukungan demonstran Hong Kong melalui media sosial (“Pedemo Hong Kong Serukan Dukungan bagi Demonstran Indonesia”, 30 September 2019).

Dinamika yang terjadi di Hong Kong, serta kemungkinan dampaknya bagi krisis global yang diprediksi terjadi pada tahun 2020 menjadi topik utama dari artikel ini. Untuk memahaminya secara lebih mendalam, artikel ini membahas posisi strategis Hong Kong bagi Tiongkok dalam kompetisi global, terutama dalam menghadapi AS. Pola-pola yang terjadi di Hong Kong juga menjadi bagian penting dari artikel ini untuk memberi perspektif tentang bagaimana suatu dinamika politik lokal dapat mengalami eskalasi hingga berpotensi menimbulkan implikasi pada tataran global, termasuk Indonesia.

PEMBAHASAN

Posisi Vital Hong Kong bagi Tiongkok

Sebelum tahun 1997, Hong Kong merupakan koloni Inggris menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu I yang berlangsung pada 1839-1842. Sebagai konsekuensi dari kekalahan tersebut, Dinasti Qing yang saat itu menguasai Tiongkok menyerahkan Hong Kong kepada Inggris melalui Perjanjian Nanjing pada 29 Agustus 1842.

Wilayah koloni Inggris kemudian semakin luas menyusul kekalahan Tiongkok berikutnya dalam Perang Candu II pada tahun 1856 hingga 1860. Menyusul kekalahan itu, Tiongkok menyerahkan wilayahnya yang lain, yaitu Kowloon kepada Inggris pada tahun 1860 melalui Konvensi Beijing.

Posisi Inggris semakin menguat setelah penandatanganan suatu perjanjian sewa dengan Tiongkok atas 235 pulau-pulau kecil di sekitar Hong Kong dan Kowloon yang disebut New Territories selama 99 tahun; terhitung sejak 1 Juli 1898 (“Chronology:



Timeline of 156 Years of British Rule in Hong Kong”, 28 Juni 2007).

Sebagai koloni Inggris, Hong Kong beserta Kowloon dan New Territories menjalankan pemerintahan otonom di bawah seorang Gubernur yang ditunjuk oleh London. Secara umum, Hong Kong mengadopsi prinsip dan praktek-praktek politik maupun yudisial yang berlaku di Inggris. Selain itu, Hong Kong juga memiliki Dewan Legislatif, serta otoritas untuk menerbitkan mata uangnya sendiri. Dalam hal kewarganegaraan, warga Hong Kong memiliki status sebagai *British Overseas Territories Citizen* dengan paspor berbeda dengan paspor Britania Raya (termasuk Inggris).

Status Hong Kong sebagai koloni Inggris berakhir menyusul penyerahan kembali wilayah itu kepada Tiongkok pada 1 Juli 1997. Sejak saat itu, Hong Kong berstatus sebagai Daerah Administrasi Khusus (SAR atau *Special Administrative Region*; *Tequ* dalam bahasa Mandarin).

Bagi Tiongkok, kembalinya Hong Kong merupakan simbol harga diri, setelah negeri itu mengalami kekalahan perang dan kehilangan kedaulatan atas wilayahnya sendiri pada abad ke-19. Dengan demikian, Tiongkok memiliki cita-cita untuk mengembalikan tidak hanya Hong Kong, tetapi juga Taiwan dan Makau ke dalam satu Tiongkok.

Hong Kong menjadi koloni Inggris sejak kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu I tahun 1842, sedangkan Makau berada di bawah kontrol Portugal sejak pendudukan orang-orang Portugis di wilayah itu pada tahun 1557. Ada pun Taiwan dianggap sebagai provinsi yang ‘membangkok’ sejak

tahun 1949, setelah rezim Kuomintang (KMT) di bawah pimpinan Chiang Kai Sek mendirikan pemerintahan di pulau itu menyusul jatuhnya Tiongkok ke tangan kekuasaan Partai Komunis Tiongkok (PKT) di bawah Mao Zedong.

Upaya mengembalikan wilayah itu sudah dirintis sejak era Deng Xiaoping, terutama di awal era 1980-an. Pada tahun 1981, Tiongkok memperkenalkan istilah “satu negara dua sistem” (*one country two system* atau *yiguo liangzhi*) dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan. Pada konteks ini, setelah reunifikasi Taiwan akan menikmati otonomi seluas-luasnya untuk menjalankan roda politik dan ekonomi dalam bingkai kedaulatan Tiongkok (Lanteigne, 2016, hal. 36).

Konsep satu negara dua sistem ini juga yang ditawarkan oleh Tiongkok untuk Hong Kong saat dialog antara Tiongkok dengan Inggris pada tahun 1984 mengenai pengembalian Hong Kong. Dalam kerangka satu negara dua sistem, Hong Kong mendapat jaminan untuk melanjutkan sistem politik dan ekonomi yang telah dijalankannya selama berada di bawah Inggris kelak ketika sudah kembali ke Tiongkok (Yahuda, 2011, hal. 156). Keleluasaan ini berlaku selama 50 tahun sejak pengembalian Hong Kong ke Tiongkok pada 1 Juli 1997 hingga tahun 2047. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 20 Desember 1999 Makau dikembalikan oleh Portugal kepada Tiongkok.

Sebagai Daerah Administrasi Khusus atau SAR, Hong Kong memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain dengan status sebagai provinsi di Tiongkok; di antaranya Hukum Dasar Hong Kong yang menetapkan bahwa



common law atau sistem hukum Anglo-Saxon tetap berlaku di Hong Kong. Hukum Dasar juga menjamin bahwa setiap orang di Hong Kong memiliki kedudukan setara di hadapan hukum, serta kebebasan untuk beragama dan menyatakan pendapat.

Selain itu, Hong Kong juga memiliki mata uang tersendiri yang sudah berlaku sejak jaman kolonial Inggris, serta paspor bagi warganya yang berbeda dengan paspor warga Tiongkok lainnya.

Tepat dua puluh tahun sejak kembalinya Hong Kong ke Tiongkok, tepatnya pada 1 Juli 2017, Presiden Tiongkok yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (Sekjen PKT) Xi Jinping (*Xi Jinping: The Governance of China II*, 2017, hal. 472) mengatakan bahwa Hong Kong saat ini adalah salah satu daerah perekonomian paling bebas dan paling kompetitif di dunia. Sejak kembali ke Tiongkok, Hong Kong sistem hukum, gaya hidup, dan perekonomian kapitalis yang sudah dijalankan selama ini tetap tidak berubah, sehingga Hong Kong mampu mempertahankan kemakmuran dan stabilitas. Ini terbukti dari kemampuan Hong Kong bertahan dari dampak krisis keuangan Asia, wabah penyakit SARS, serta krisis keuangan global. Dengan demikian Xi menekankan bahwa prinsip satu negara dua sistem merupakan solusi terbaik bagi sejarah Hong Kong, serta tatanan institusional terbaik untuk menjamin kemakmuran dan stabilitas Hong Kong dalam jangka panjang.

Lebih jauh, Xi Jinping pada kesempatan yang sama kembali menegaskan bahwa kedaulatan Tiongkok adalah hal yang mutlak, walau di Hong Kong berlaku prinsip satu negara dua sistem. Menurut Xi, jika

prinsip “satu negara dua sistem” merupakan pohon, “satu negara” merupakan bagian akar dari pohon itu. Dengan demikian, pada dasarnya prinsip “satu negara dua sistem” dikembangkan semata-mata demi mewujudkan dan menjunjung persatuan nasional Tiongkok. Mengenai hal ini, Xi menekankan bahwa:

“Segala upaya yang membahayakan kedaulatan dan keamanan Tiongkok, menentang otoritas pemerintah pusat dan kesucian Hukum Dasar Daerah Administratif Khusus Hong Kong, atau menggunakan Hong Kong sebagai alat untuk melakukan infiltrasi dan sabotase melawan Tiongkok merupakan tindakan yang sudah melewati batas, serta mutlak tidak diperkenankan” (Xi Jinping, 2017, hal. 474).

Sikap Tiongkok untuk tidak mentolerir upaya untuk memecah belah Tiongkok kembali diungkapkan oleh Xi Jinping saat kunjungannya ke Nepal pada 13 Oktober 2019, menyusul berlarutnya krisis politik di Hong Kong. Pada kesempatan itu Xi Jinping mengingatkan bahwa Tiongkok akan menggagalkan setiap upaya untuk memecah belah negara itu, serta menegaskan bahwa rakyat Tiongkok melihat setiap upaya pihak asing untuk memecah belah Tiongkok sebagai hal yang tidak realistis. Beberapa kalangan, seperti pengamat dari Renmin University, Beijing, Tiongkok Shi Yinhong memprediksi bahwa pernyataan Xi Jinping di Nepal pada Oktober 2019 memang ditujukan bagi AS dan pihak-pihak asing lainnya untuk tidak ikut memperkeruh suasana di Hong Kong (Yau, Wu, dan Cheung, 13 October 2019).



Pernyataan Xi Jinping pada tahun 2017, serta pada Oktober 2019 dengan sangat tegas memberi peringatan kepada pihak mana pun bahwa segala upaya untuk mendestabilisasi Hong Kong merupakan tindakan yang mengganggu kedaulatan Hong Kong.

Sebelumnya, pada Agustus 2019, Tiongkok diketahui mengadakan gelar pasukan di Shenzhen, Provinsi Guangdong yang berbatasan langsung dengan Hong Kong. Tindakan itu menimbulkan spekulasi bahwa penggunaan kekuatan militer merupakan opsi yang mungkin akan diambil oleh Tiongkok untuk menangani demonstrasi yang terus terjadi di Hong Kong (Lam, 19 Agustus 2019).

Pada tataran tertentu, spekulasi intervensi asing - terutama AS - dalam krisis politik di Hong Kong semakin menguat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat AS meloloskan UU (undang-undang) yang mendukung penegakan HAM (hak asasi manusia) dan demokrasi di Hong Kong untuk ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump.

UU itu menegaskan pemberian sanksi bagi pejabat Tiongkok dan Hong Kong yang melakukan pelanggaran HAM di Hong Kong, serta melarang ekspor material yang dapat digunakan untuk menangani demonstrasi, seperti gas air mata dan peluru karet ke Hong Kong. Selanjutnya, UU itu memungkinkan pemerintah AS untuk dapat meninjau kembali status perdagangan khusus yang diberikan kepada Hong Kong jika Tiongkok dianggap telah melanggar otonomi khusus yang diberikan kepada wilayah administratif itu (Zengerle dan Cowan, 21 November 2019) . AS

memiliki Undang-Undang Kebijakan AS-Hong Kong tahun 1992 yang memberikan Hong Kong perlakuan khusus yang berbeda dengan perlakuan kepada Tiongkok dalam hal perdagangan. Hal itu terjadi karena Hong Kong sebagai wilayah administratif khusus Tiongkok menerapkan sistem hukum berbeda dengan Tiongkok, sesuai prinsip “satu negara dua sistem”.

Di samping masalah kedaulatan, Hong Kong sebenarnya memiliki arti penting lain bagi Tiongkok, terutama dalam masalah finansial dan ekonomi. Noah Sin dalam tulisannya di *Reuters* (5 September 2019) mengatakan bahwa skala perekonomian Hong Kong dibanding Tiongkok memang merosot dari 18,4% pada tahun 1997 ke 2,7% pada tahun 2019. Akan tetapi, prinsip “satu negara dua sistem” yang berlaku di Hong Kong saat ini mampu mempertahankan posisi wilayah itu tidak hanya sebagai salah satu pusat finansial dunia, tetapi juga sebagai *hub* finansial dan perdagangan yang penting bagi Tiongkok.

Sebagai contoh, skema antara bursa Hong Kong dengan dua bursa lainnya di Tiongkok , yaitu Shenzhen dan Shanghai memungkinkan asing untuk membeli saham di *Mainland*. Di bidang perdagangan, prinsip “satu negara dua sistem” memungkinkan Hong Kong untuk melakukan negosiasi perdagangan dan investasi dengan pihak mana pun secara independen dari Tiongkok, sehingga ketika berdagang dengan AS, Hong Kong tidak perlu membayar tarif sebagaimana diterapkan AS kepada Tiongkok.

Di pihak Tiongkok, status Hong Kong sebagai wilayah dengan sistem hukum yang independen dari Tiongkok memberi



keuntungan tersendiri bagi negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia itu. Dalam hal ini, Noah Sin mengungkapkan bahwa menurut data dari perusahaan yang bergerak di bidang finansial dan resiko bisnis Refinitv, Hong Kong merupakan *hub* bagi perusahaan-perusahaan besar Tiongkok untuk melakukan ekspansi ke pasar global. Pada tahun 2018, dana perusahaan-perusahaan Tiongkok yang *listing* di bursa Hongkong mencapai 35 miliar dollar AS, sedangkan jumlah dana perusahaan-perusahaan Tiongkok yang *listing* di bursa Shanghai dan Shenzen hanya mencapai 19,7 miliar dollar AS.

Lebih dari itu, Hong Kong masih merupakan pelabuhan utama bagi ekspor dan impor Tiongkok, serta mitra perdagangan terbesar bagi Tiongkok di bidang jasa dengan *market share* sebesar 20%, dibanding dengan AS yang hanya mencapai 17%. Dengan berbagai posisi penting di bidang finansial dan perdagangan itu, Noah Sin berpendapat bahwa Hong Kong memiliki posisi vital bagi Tiongkok untuk menjadikan Yuan sebagai mata uang internasional yang bersaing dengan dollar AS.

Pada akhir Oktober 2019, otoritas Hong Kong mengakui bahwa wilayah berstatus daerah administratif itu tengah mengalami resesi ekonomi. Hal itu terjadi karena PDB Hong Kong menurun hingga 0,5% dan 3,2% masing-masing pada kuartal dua (Q2) dan kuartal tiga (Q3) tahun 2019.

Pakar ekonomi Asia dari Oxford Economics Sian Fenner seperti yang dikutip oleh jurnalis CNBC Grace Shao (1 November 2019) mengatakan bahwa perekonomian Hong Kong mendapat pukulan akibat

berlarutnya demonstrasi, serta Perang Dagang antara AS dengan Tiongkok. Dalam hal ini, demonstrasi sangat mempengaruhi penjualan ritel dan turisme; sedangkan Perang Dagang AS-Tiongkok berpengaruh pada ekspor wilayah itu. Laporan CNBC juga menulis bahwa lembaga statistik Hong Kong mengakui bahwa level konsumsi domestik menurun akibat demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Di sisi lain, ekspor semakin menurun sehubungan berlanjutnya Perang Dagang AS-Tiongkok.

Tidak hanya Hong Kong, perekonomian Tiongkok selama Q2 dan Q3 menunjukkan tren penurunan, bahkan mencapai titik terendah selama 27 tahun. Sebelum Hong Kong mengumumkan kondisi resesi, Biro Statistik Nasional Tiongkok menyatakan bahwa pada Q2 dan Q3 tahun 2019, perekonomian Tiongkok secara berturut-turut merosot hingga level 6,2% dan 6%. Ada dua hal yang mendorong menurunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yaitu menurunnya permintaan domestik dan berlarut-larutnya Perang Dagang AS-Tiongkok (“China’s GDP Growth Slows to 27-year Low”, 18 Oktober 2019).

AS dan Tiongkok sedianya akan menandatangani perjanjian terkait perdagangan antara kedua negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation* (KTT APEC) di Chili pada 16-17 November 2019. Akan tetapi, hal ini urung terwujud karena Chile menarik diri dari tuan rumah KTT sehubungan krisis politik yang juga tengah terjadi di negeri Pegunungan Andes itu.



Resesi Hong Kong dan Ancaman Krisis Global 2020

Beberapa kalangan, seperti UNCTAD memprediksi bahwa krisis global akan terjadi pada tahun 2020. Menurut laporan UNCTAD, pertumbuhan ekonomi dunia hingga akhir tahun 2019 akan turun dari 3% pada tahun 2018 ke level 2,3%, atau terendah sejak tahun 2009 yang mengalami kontraksi hingga mencapai -1,7% (*Trade and Development Report 2019*, 2019, hal. 2). Ada beberapa faktor yang akan mendorong terjadinya krisis global pada tahun 2020, antara lain berlanjutnya Perang Dagang AS-Tiongkok, volatilitas mata uang, ketidakpastian mengenai Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa), serta pasang surut harga komoditas (*Trade and Development Report 2019*, 2019, hal. II-III).

Selain UNCTAD, *International Monetary Fund* atau IMF juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat hingga hanya akan menyentuh 3% pada akhir tahun 2019, atau lebih rendah dari prediksi pada Juli 2019 yang mencapai 3,2%. Menurut laporannya yang dirilis pada Oktober 2019, IMF mengungkapkan bahwa perlambatan ini terjadi akibat ketidakpastian dalam perdagangan dunia dan kerja sama internasional yang disebabkan oleh konstelasi geopolitik dan perang dagang. Faktor-faktor lain seperti *aging population* dan menurunnya produktivitas di negara-negara maju, serta tekanan makro ekonomi di kalangan negara berkembang telah turut berkontribusi pada perlambatan ekonomi dunia. IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 akan mencapai 3,4%, atau lebih rendah dari prediksi yang dibuat pada Juli

2019 yang berada pada angka 3,5% (Olivia dan Rahmawati (ed.), 16 Oktober 2019).

Posisi Hong Kong sebagai hub finansial serta perdagangan bagi Tiongkok maupun global mendorong prediksi bahwa ketidakpastian di Hong Kong dapat memicu resesi dunia. Ekonom dari Harvard University, AS Carmen Reinhart menyebutkan bahwa gejolak yang tengah terjadi di Hong Kong dapat menjadi titik kritis bagi perekonomian dunia selain Perang Dagang AS-Tiongkok.

Dalam hal ini, Carmen menegaskan bahwa apa yang terjadi di Hong Kong tidak hanya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Tiongkok maupun di regional Asia, tetapi juga dapat memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Selain Carmen, Presiden Federal Reserve Bank of Boston Eric Rosengren mengatakan bahwa Hong Kong merupakan salah satu “kota global” yang utama. Dengan demikian, masalah Hong Kong dapat menjalar ke konteks lebih luas hingga pasar internasional (Curran, 23 Agustus 2019).

PENUTUP

Kesimpulan

Krisis politik dan resesi ekonomi yang tengah terjadi di Hong Kong tidak dapat dilihat hanya sebagai dinamika internal Hong Kong, atau masalah domestik antara Hong Kong dan Tiongkok.

Berbagai dinamika eksternal lain, seperti disetujuinya UU HAM dan Demokrasi Hong Kong oleh DPR dan Senat AS menunjukkan bahwa masalah Hong Kong telah berkembang menjadi isu global. Prediksi ini semakin kuat dengan fakta bahwa AS membuat langkah itu di saat



Perang Dagang AS-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak tahun 2018 belum menunjukkan kemajuan positif untuk segera berakhir.

Tidak sampai di situ saja, tindakan AS tersebut pada tataran tertentu dapat membenarkan tesis Beijing bahwa pihak asing, terutama AS, tidak hanya telah mengorkestrasi krisis yang terjadi di Hong Kong, tetapi juga tengah berupaya untuk memecah belah Tiongkok. Dalam hal ini, Tiongkok telah memperingatkan secara keras bahwa negara itu akan melakukan segala upaya untuk meredam berbagai upaya yang mengancam disintegrasi dan kedaulatan mereka.

Beijing diprediksi tidak bertindak gegabah dengan melakukan intervensi militer atau melakukan tindakan pengamanan lebih lanjut, sebab langkah itu akan berakibat fatal, yaitu berakhirnya status Hong Kong sebagai wilayah atau *hub* keuangan global dan perdagangan bebas dunia yang diperlakukan berbeda dengan Tiongkok. Bagi Tiongkok, hilangnya status Hong Kong sebagai *hub* perdagangan dan finansial global akan menimbulkan kerugian, mengingat peran strategis Hong Kong bagi kegiatan perdagangan dan keuangan Tiongkok.

Selain itu, sejarah mencatat bahwa penggunaan kekerasan Beijing terhadap demonstrasi mahasiswa di Lapangan Tiananmen pada Mei 1989 telah membuat Tiongkok terisolir sementara di kancah internasional. Jika kejadian serupa terulang pada kasus Hong Kong, hal itu akan merugikan upaya unifikasi "Satu Tiongkok" seperti yang telah dirintis melalui prinsip "satu negara dua sistem" di Hong Kong.

Dalam hal ini, tindakan kekerasan apa pun yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Hong Kong akan menjadi preseden yang buruk bagi upaya negara itu untuk melakukan unifikasi dengan Taiwan.

Akan tetapi, dugaan itu bisa saja meleset jika Beijing sudah merasa bahwa ancaman terhadap integrasi dan kedaulatan Tiongkok sudah berada pada tahap tidak bisa ditolerir lebih lanjut.

Berbagai perkembangan yang terjadi di Hong Kong di tengah memanasnya Perang Dagang AS-Tiongkok semakin menambah ketidakpastian global. Bahkan, dunia diprediksi akan memasuki krisis pada tahun 2020, seperti halnya krisis finansial Asia dan global masing-masing pada 1997 dan 2008.

Bagi Indonesia, krisis Hong Kong mau tidak mau tidak dapat dilepaskan dari kontestasi AS dan Tiongkok pada tataran global, sehingga para pembuat kebijakan seyogyanya mewaspadai dinamika geopolitik ini dalam membuat kebijakan luar negeri maupun ekonomi, keuangan, dan perdagangan.

Di bidang ekonomi, resesi di Hong Kong dapat berimbas secara langsung dan tidak langsung kepada Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa resesi di Hong Kong tidak akan berpengaruh secara signifikan kepada Indonesia, mengingat kekuatan pasar domestik yang dimiliki Indonesia.

Selain itu, pasar di Tiongkok dan AS sebagai mitra dagang utama Indonesia masih dapat diandalkan, mengingat perekonomian kedua negara itu masih positif, walau menunjukkan perlambatan. Airlangga menambahkan bahwa resesi di



Hong Kong tidak berpengaruh signifikan ke Indonesia, karena fungsi Hong Kong pada perdagangan Indonesia lebih pada pelabuhan transit. Dalam hal ini, peran Hong Kong sebagai *trans shipment* bagi ekspor-impor antara Tiongkok dan Indonesia juga sudah tidak signifikan, sebab proses itu sudah dilakukan langsung tanpa melibatkan Hong Kong (Setiawan dan Agustiani (ed.), 5 November 2019).

Menurut Trade Map seperti yang dikutip oleh CNBC, ekspor Indonesia ke Hong Kong pada tahun 2018 mencapai 2,56 miliar dollar AS atau hanya 1,4% dari total ekspor Indonesia sebesar 180,2 miliar dollar AS (Kevin, 1 November 2019).

Pada tataran tertentu, volume perdagangan tersebut dapat menunjukkan bahwa resesi ekonomi di Hong Kong tidak terlalu berpengaruh pada Indonesia. Akan tetapi, resesi di Hong Kong berpotensi menimbulkan dampak lain terhadap perekonomian Indonesia dari segi investasi.

Sebagai gambaran, menurut Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada semester I tahun 2019 nilai investasi atau penanaman modal asing (PMA) di Indonesia mencapai Rp121,8 triliun. Dari nilai tersebut, Hong Kong menempati posisi investor asing terbesar ke empat dengan total PMA sebesar 1,3 miliar dollar AS atau 9,2 persen dari jumlah keseluruhan PMA pada semester I tahun 2019.

PMA dari Hong Kong menempati posisi signifikan pada investasi di Indonesia. Dengan demikian, pada level tertentu, resesi ekonomi di Hong Kong berpotensi mengurangi PMA Hong Kong di Indonesia, sehingga berdampak pada kegiatan perekonomian Indonesia.

Indonesia dalam hal ini membutuhkan PMA untuk menjaga atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi; apalagi dalam bayang-bayang krisis global tahun 2020. Sebagai gambaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada September 2019 pernah mengemukakan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3% pada tahun 2020. Hal itu antara lain disebabkan oleh Perang Dagang AS-Tiongkok yang mengakibatkan ketidakpastian harga komoditas dan perlambatan ekonomi di beberapa negara di dunia (Olivia dan Laoli (ed.), 24 September 2019).

Tidak hanya di bidang ekonomi, krisis politik di Hong Kong perlu dicermati, karena dukungan demonstran Hong Kong melalui media sosial terhadap aksi-aksi demonstrasi di Tanah Air pada akhir September hingga awal Oktober 2019 lalu.

Sebagai contoh, seorang warganet yang disebut sebagai mahasiswa Chinese University of Hong Kong bernama Alex bersuara di Twitter untuk mendukung mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menentang RUU KUHP dan RUU KPK. Adapun cuitan Alex tersebut berbunyi "*Stay strong. Hongkongers will stand with Indonesia. May democracy and freedom reign everywhere*" ("Pedemo Hong Kong", 30 September 2019).

Unjuk rasa atau demonstrasi sebenarnya merupakan hak warga negara Indonesia (WNI); akan tetapi terdapat keprihatinan bahwa aksi demonstrasi sepanjang akhir September-awal Oktober 2019 lalu berujung pada aksi kekerasan dan pengrusakan di beberapa tempat di Jakarta.



Aksi demonstrasi di Tanah Air yang mendapat dukungan dari warga asing - walau hanya sebatas cuitan di media sosial - membuktikan bahwa suatu kejadian politik di dalam negeri dapat dengan mudah mendapat dukungan individu atau kelompok di luar negeri dalam waktu yang sangat singkat, terutama karena kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat dalam era Revolusi Industri 4.0.

Pada tataran tertentu, dukungan individu dari Hong Kong terhadap demonstran di Indonesia menunjukkan kecenderungan adanya *global network society* atau masyarakat jaringan global seperti yang diutarakan oleh Manuel Castells (2013). *Network society* yang dimaksud Castells di sini adalah suatu struktur sosial yang dibentuk oleh jaringan berbasis mikroelektronik, teknologi komunikasi, serta informasi yang diproses secara digital. Castells memaknai "struktur sosial" sebagai tatanan hubungan antar manusia dalam hal produksi, konsumsi, reproduksi, pengalaman, serta kekuasaan yang terwujud dalam bentuk komunikasi.

Jaringan digital dapat membentuk diri mereka sendiri sesuai dengan kepentingan orang atau kelompok yang menyusunnya, serta bersifat global dengan kemampuan menembus batasan teritorial maupun institusional melalui jaringan komputer.

Saat ini, struktur sosial seperti yang dimaksud Castells sudah sangat dipengaruhi oleh jaringan digital, sehingga *network society* - dengan intervensi teknologi informasi - menjadi *global society*. Castells menggarisbawahi Hammond *et. al* (2007) bahwa *global society* tidak berarti bahwa semua orang di semua tempat merupakan

bagian dari jaringan-jaringan itu. Akan tetapi, mereka mendapat imbas dari berbagai aktivitas pada jaringan global yang membentuk struktur sosial (Castells, 2013, hal. 24-25).

Aktivitas itu menurut Held *et. al* (1999), Volkmer (1999), Castells (2000), Jacquet *et. al* (2002), Stiglitz (2002), Kaldor (2003), Grewal (2008), dan Juris (2008) mencakup berbagai bidang kehidupan manusia yang, seperti pasar keuangan, distribusi barang dan jasa, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, jaringan internet, hingga aktivitas gerakan sosial dan organisasi non pemerintah (NGO atau non-government organization) yang menekankan berbagai hak dan nilai pada masyarakat global (Castells, 2013, hal. 25).

Bertolak dari pemikiran Castells, dapat dipahami bahwa masyarakat Indonesia, terutama dalam perkembangan teknologi informasi yang sangat masif di era Revolusi Industri 4.0, merupakan bagian dari masyarakat global. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia akan mendapat imbas dari berbagai aktivitas atau kejadian di berbagai belahan dunia lain, termasuk seperti yang terjadi di Hong Kong, *vice versa*.

Saran

Demonstrasi mahasiswa pada akhir September hingga awal Oktober 2019, serta rangkaian demonstrasi maupun kerusuhan di Papua dan Papua Barat sepanjang Agustus-September 2019 memperlihatkan bahwa Indonesia tidak imun dari kasus seperti yang terjadi di Hong Kong; dan yang harus diwaspadai adalah upaya membawa isu domestik di Tanah Air ke



tataran internasional. Tidak hanya dalam kasus demonstrasi mahasiswa September 2019 lalu, peristiwa di Papua juga tidak lepas dari komentar asing, salah satunya dari pemimpin separatis Catalonia yang menuntut kemerdekaan dari Spanyol Carles Puigdemont. Hal itu terungkap dari cuitan Puigdemont di Twitter yang menyatakan dukungannya terhadap kelompok pro kemerdekaan Papua (“Separatis Catalonia Dukung Kemerdekaan Papua”, 24 Oktober 2019).

Pada titik inilah kewaspadaan nasional menuntut kemampuan tidak hanya dalam mengantisipasi datangnya suatu gejala, tetapi lebih dari itu untuk memahami akar dan latar belakang suatu masalah politik. Selain itu, dalam menghadapi gejala, pengambil kebijakan disarankan untuk menghindari pendekatan represif hingga tataran tertentu. Sebab, pendekatan represif yang diambil tanpa perhitungan matang berpotensi mengundang intervensi lebih jauh dari pihak eksternal.

Peristiwa di Hong Kong juga membuktikan bahwa krisis politik yang berkelanjutan mampu mendorong terjadinya resesi ekonomi. Akan tetapi, tidak hanya di situ, sebaliknya krisis ekonomi yang berkelanjutan juga dapat memicu gejala politik yang lebih besar. Oleh sebab itu, kewaspadaan nasional menuntut antisipasi terhadap krisis ekonomi, sosial, dan politik secara komprehensif dan terintegrasi, tidak secara parsial.

Adanya resesi ekonomi mendorong prediksi bahwa PMA Hong Kong ke Indonesia akan mendorong di tahun 2020. Demikian pula halnya dengan Tiongkok, karena pertumbuhan ekonomi negara itu

tengah mengalami perlambatan hingga titik terendah sejak 27 tahun lalu. Oleh sebab itu, untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, Indonesia perlu mencari strategi baru tidak hanya dalam mencari sumber PMA alternatif, tetapi juga menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi investasi.

Selain itu, Indonesia juga dapat mengandalkan konsumsi domestik, terlebih Indonesia memiliki pasar domestik yang cukup kuat. Sebagai contoh, perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2019 tumbuh hingga 5,07% dengan lebih dari separuhnya atau sebesar 56,82% ditopang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga (Jayani dan Widowati (ed.), 6 Mei 2019).

Tidak kalah pentingnya adalah Indonesia membutuhkan suatu strategi komprehensif untuk menghidupkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena dibanding perusahaan besar, sektor ini dipercaya lebih resisten terhadap krisis.

Pada akhirnya, Indonesia perlu menyegarkan kembali pemahaman yang sudah ada, bahwa kontribusi faktor eksternal tidak dapat dikesampingkan dalam stabilitas nasional. Dalam konteks ini, kejadian di Hong Kong pada tataran tertentu akan berimbas pada Indonesia dalam berbagai bidang, terutama ekonomi, sosial, dan politik. Tanpa menanggalkan optimisme, bangsa Indonesia harus mampu mengantisipasi berbagai gejala dunia pada tahun 2020 untuk menjaga ketahanan dan stabilitas nasional.



DAFTAR PUSTAKA

1. Castells, Manuel. *Communication Power*. (2013). Oxford University Press.
2. China's GDP Growth Slows to 27-year Low. (18 Oktober 2019). *Deutsche Welle*. Diakses dari <https://www.dw.com/en/chinas-gdp-growth-slows-to-27-year-low/a-50881319>.
3. Chronology: Timeline of 156 Years of British Rule in Hong Kong. (28 Juni 2007). *Reuters*. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-hongkong-anniversary-history/chronology-timeline-of-156-years-of-british-rule-in-hong-kong-idUSSP27479920070627>.
4. Curran, Enda. (Agustus 2019). Harvard Economist Warns Hong Kong Could Trigger World Recession. *Bloomberg*. Diakses dari <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-23/harvard-s-reinhart-warns-hong-kong-could-trigger-world-recession>.
5. Di Sidang PBB, Trump Tekan China soal Hong Kong. (25 September 2019). *CNN Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/sional/20190925102134-134-433755/di-sidang-pbb-trump-tekan-china-soal-hong-kong>
6. Hong Kong protests: Key dates as peaceful rallies against extradition Bill turn to violent clashes. (4 September 2019). *Channel News Asia*. Diakses dari <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/hong-kong-protest-timeline-extradition-bill-china-11676634>.
7. Hong Kong formally scraps extradition bill that sparked protests. (23 Oktober 2019). *BBC News*. Diakses dari www.bbc.com/news/world-asia-china-50150853.
8. Jayani, Dwi Hadya dan Widowati, Hari. (6 Mei 2019). Konsumsi Rumah Tangga Menyumbang 56,82% PDB. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id>.
9. Kevin, Anthony. (1 November 2019). Hong Kong Resmi Resesi, Apa Dampaknya Buat Indonesia? *CNBC Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191101130606-17-111974/hong-kong-resmi-resesi-apa-dampaknya-buat-indonesia/2>.
10. Kuo, Lily. (11 November 2019). Hong Kong protests: man shot by police and burns victim in critical condition. *The Guardian*. Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2019/nov/11/hong-kong-police-shoot-demonstrator-during-morning-rush-hour>.
11. Lam Yik Fei. (19 Agustus 2019). With Troop Buildup, China Sends a Stark Warning to Hong Kong. *The New York Times*. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2019/08/19/world/asia/hong-kong-china-troops.html>.
12. Lanteigne, Marc. (2016). *Chinese Foreign Policy* (edisi ke 3). London: Routledge.
13. Olivia, Grace dan Laoli, Noverius (ed.). (24 September 2019). UU APBN: Sri Mulyani Akui Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3% Cukup Menantang. *Kontan online*. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/uu-apbn-2020-sri-mulyani-akui-target-pertumbuhan-ekonomi-53-cukup-menantang?page=all>.
14. Olivia, Grace dan Rakhmawati, Wahyu